

Transformasi Keamanan-Pertahanan Ukraina Pasca Invasi Rusia dan Implikasinya bagi Indonesia

Defrida Suzana Lukuaka

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, defisuzana@gmail.com

ABSTRAK

Perang Rusia-Ukraina menjadi salah satu contoh perang modern terbaru di mana perang tidak lagi berada pada tingkatan konvensional tetapi telah bergeser ke perang hibrida. Ukraina sebagai negara yang baru merdeka pada tahun 1991, secara cepat mampu mengimbangi Rusia meski secara keseluruhan masih terdapat beberapa permasalahan salah satunya terhambatnya reformasi militer Ukraina itu sendiri. Akan tetapi secara bertahap Ukraina mampu melakukan perubahan besar dalam keamanan dan pertahanannya selama diinvasi oleh Rusia. Mulai birokrasi pertahanan hingga prajurit di medan pertempuran. Pengalaman Ukraina dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia di antara reformasi militer, fleksibilitas pertahanan dalam menghadapi dinamika perang modern serta kemampuan dalam peningkatan kerjasama di kawasan regional sebagai kekuatan pertahanan regional. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi pustaka. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa secara strategi Indonesia bisa mempelajari kebijakan-kebijakan Pertahanan-Keamanan Ukraina tetapi tanpa meninggalkan karakteristik pertahanan Indonesia. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan studi keamanan nasional Indonesia dengan menyediakan kerangka perbandingan sistematis dan rekomendasi praktis untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia melalui pembelajaran dari pengalaman Ukraina dalam menghadapi ancaman multidimensional.

Kata Kunci: Indonesia, Keamanan, Pertahanan, Ukraina.

ABSTRACT

The Russia-Ukraine War represents one of the most recent examples of modern warfare where conflict is no longer confined to conventional levels but has shifted toward hybrid warfare. Ukraine, as a newly independent nation since 1991, has rapidly demonstrated its ability to match Russia despite overall challenges, including obstacles to Ukraine's own military reform. Nevertheless, Ukraine has gradually achieved significant transformations in its security and defense capabilities during the Russian invasion, ranging from defense bureaucracy to soldiers on the battlefield. Ukraine's experience can serve as a valuable lesson for Indonesia regarding military reform, defense flexibility in addressing modern warfare dynamics, and capabilities in enhancing regional cooperation as a *Based Shield*. This article employs qualitative research methodology through a literature review approach. The research findings indicate that strategically, Indonesia can learn from Ukraine's Defense-Security policies while maintaining Indonesia's defense characteristics. This article contributes to the development of Indonesian national security studies by providing a systematic comparative framework and practical recommendations for strengthening Indonesia's national resilience through lessons learned from Ukraine's experience in confronting multidimensional threats..

Keywords: Indonesia, Security, Defense, Ukraine

PENDAHULUAN

Keamanan nasional merupakan konsep yang sangat penting bagi setiap negara, termasuk Ukraina dan Indonesia. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan pertahanan militer, tetapi juga

mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Keamanan nasional dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana suatu negara mampu melindungi diri dari ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman ini dapat berupa

militer, non-militer, dan hibrida yang mencakup konflik sosial, ekonomi, budaya, serta ancaman terhadap lingkungan (Perwita, 2013). Dalam konteks ini, keamanan nasional menjadi landasan bagi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Setiap negara menerapkan konsep keamanan nasionalnya mereka dengan mengacu pada kepentingan nasional mereka yang juga tidak terlepas dari dinamika keamanan internasional (Sukmadi, 2010).

Masa-masa awal kemerdekaan di tahun 1991, Ukraina telah menghadapi tantangan kompleks dalam mendefinisikan dan mengimplementasikan konsep keamanan nasionalnya. Posisi geografis Ukraina yang berada di antara Rusia dan Barat telah membentuk dinamika keamanannya secara signifikan (Wolczuk, 2016). Pada awalnya, Ukraina menganut kebijakan netralitas dan pendekatan multi-vektor dalam urusan luar negeri dan keamanannya (Kuzio, 2016). Namun, kebijakan ini terbukti tidak mampu melindungi kepentingan nasional Ukraina di tengah meningkatnya tekanan geopolitik.

Indonesia memiliki kesamaan karakteristik strategis dengan Ukraina yang memerlukan pembelajaran mendalam dari pengalaman konflik tersebut. Pertama, Indonesia menghadapi tantangan geografis serupa sebagai negara yang terletak di antara persaingan kekuatan besar - Amerika Serikat dan Tiongkok - dalam konteks geopolitik Indo-Pasifik. Kedua, Indonesia menghadapi ancaman separatisme yang berkelanjutan di beberapa wilayah, sebagaimana Ukraina mengalami gerakan separatistis di wilayah timur sebelum invasi Rusia. Ketiga, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 17.504 pulau memiliki tantangan pertahanan yang kompleks dalam menjaga kedaulatan teritorial, mirip dengan Ukraina yang harus mempertahankan integritas wilayahnya.

Pengalaman Ukraina dalam mentransformasi konsep keamanan nasionalnya dari pendekatan netralitas menjadi strategi pertahanan yang lebih proaktif dan terintegrasi dengan sekutu internasional memberikan wawasan berharga bagi Indonesia. Transformasi ini mencakup modernisasi doktrin pertahanan, peningkatan kesiapan masyarakat sipil dalam menghadapi ancaman, dan pengembangan strategi pertahanan berlapis yang menggabungkan kekuatan konvensional dan non-konvensional.

Kondisi keamanan Indonesia saat ini menghadapi tantangan multi-dimensi yang memerlukan respons komprehensif. Dari aspek eksternal, Indonesia menghadapi eskalasi ketegangan di Laut Tiongkok Selatan yang berpotensi mempengaruhi stabilitas regional. Ancaman ini diperparah dengan meningkatnya aktivitas militer negara-negara besar di kawasan

Indo-Pasifik, termasuk pembentukan aliansi AUKUS yang mengubah keseimbangan kekuatan regional. Dari aspek internal, Indonesia masih menghadapi ancaman terorisme yang berkembang dengan memanfaatkan teknologi digital, gerakan separatistis di beberapa wilayah seperti Papua, serta konflik sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Selain itu, Indonesia menghadapi tantangan keamanan non-tradisional yang semakin kompleks, termasuk ancaman siber, perdagangan narkoba internasional, penyelundupan manusia, dan kejahatan lintas batas. Pandemi COVID-19 juga telah memperlihatkan kerentanan sistem keamanan nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman kesehatan global yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial.

Penelitian ini didasarkan pada beberapa faktor kritis yang memerlukan respons akademik dan kebijakan yang segera. Pertama, dinamika geopolitik global yang semakin tidak terprediksi, sebagaimana ditunjukkan oleh invasi Rusia ke Ukraina, mengharuskan Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi skenario konflik yang mungkin terjadi di kawasan Indo-Pasifik. Kedua, transformasi konsep keamanan Ukraina dari netralitas menjadi pertahanan proaktif dalam waktu yang relatif singkat memberikan pelajaran berharga tentang adaptabilitas dan resiliensi nasional yang perlu dipelajari oleh Indonesia.

Ketiga, Indonesia memerlukan evaluasi mendalam terhadap konsep keamanan nasionalnya dalam menghadapi ancaman hibrida yang semakin kompleks. Pengalaman Ukraina dalam menghadapi perang hibrida Rusia, yang menggabungkan elemen militer konvensional, perang informasi, serangan siber, dan manipulasi politik, memberikan wawasan strategis yang relevan bagi Indonesia. Keempat, dengan meningkatnya ketegangan di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia perlu mengembangkan strategi pertahanan yang dapat menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif sambil tetap mampu melindungi kepentingan nasional.

Dalam konteks ini, penelitian tentang pembelajaran dari dinamika konsep keamanan-pertahanan Ukraina pasca invasi Rusia menjadi sangat *urgent* untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan pengetahuan tentang bagaimana negara dengan karakteristik serupa dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan strategis yang drastis, serta memberikan masukan konstruktif bagi pengembangan doktrin pertahanan Indonesia di masa depan.

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan pengkajian pada artikel ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana data yang disajikan bukan dalam bentuk angka melainkan kata-kata. Kemudian dalam pendekatan penelitian, peneliti menggunakan studi dokumen. Penggunaan pendekatan studi dokumen untuk penelitian keamanan dan pertahanan Ukraina pasca invasi Rusia memungkinkan peneliti mengakses dan menganalisis beragam sumber data yang saling melengkapi. Data yang digunakan memperhatikan relevansi temporal atau diterbitkan pada tahun 2014-2024, dengan penekanan khusus pada periode pasca invasi Rusia (2022-2024). Kemudian otoritas sumber, kredibilitas akademik, keragaman perspektif dan aksesibilitas melalui portal media resmi, database akademik, dan publikasi lembaga resmi. Dalam mengkaji bahasan terkait transformasi keamanan dan pertahanan, peneliti menggunakan konsep sekuritisasi dari Barry Buzan dengan didukung dengan kajian penelitian lainnya. Konsep sekuritisasi menurut Buzan melibatkan transformasi isu-isu dari ranah politik normal menjadi isu keamanan melalui tindakan wicara (*speech act*). Dalam konteks Ukraina, invasi Rusia tahun 2022 telah mempercepat proses sekuritisasi di berbagai sektor, mengubah prioritas nasional dan alokasi sumber daya. Konsep ini relevan untuk memahami bagaimana Indonesia dapat mengantisipasi dan merespons ancaman yang berkembang (Sussex et al., 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

Konsep Keamanan Nasional

Konsep Keamanan Nasional sendiri telah didefinisikan oleh seorang ilmuwan politik bernama Barry Buzan, di mana keamanan dilihat sebagai kondisi individu, kelompok, dan negara bebas dari ancaman yang dapat mengganggu eksistensi mereka. Buzan dalam bukunya yang berjudul *"People, States, and Fear"* tahun 1983 mengemukakan bahwa keamanan harus dipahami dalam konteks yang lebih luas. Menurutnya, konsep keamanan nasional dimulai terjeganya kelangsungan hidup individu atau keamanan pribadi kemudian membentuk atau menyentuh lingkungan yang lebih luas hingga dimensi yang lebih kompleks yang disebut sebagai keamanan nasional, melalui apa yang disebut sebagai proses sekuritisasi. Proses sekuritisasi menurut Buzan melibatkan aktor sekuritisasi yang mengidentifikasi ancaman terhadap objek rujukan dan menyampaikannya kepada audiens untuk memperoleh legitimasi bagi tindakan darurat. Inti dari teori sekuritisasi adalah menunjukkan struktur retorika para pembuat keputusan ketika

membingkai suatu isu dan berusaha meyakinkan audiens untuk mengangkat isu tersebut di atas politik. Pendekatan ini menekankan bahwa keamanan bukanlah kondisi objektif, melainkan konstruksi sosial yang dibentuk melalui diskursus. Konsep keamanan nasional sendiri terdapat dalam beberapa sektor fundamental yang saling berkaitan .

Sektor Fundamental Keamanan Nasional

Dalam konteks keamanan nasional, terdapat lima sektor fundamental yang saling terkait dan mempengaruhi stabilitas serta ketahanan suatu negara. Sektor militer merupakan aspek pertama yang fokus pada perlindungan fisik wilayah dari ancaman eksternal dan internal. Pertahanan militer berperan strategis dalam menjaga kedaulatan negara, mencegah agresi bersenjata dan meminimalisir potensi konflik yang dapat mengancam integritas teritorial.

Sektor politik memainkan peranan krusial dalam menjaga stabilitas sistem pemerintahan. Legitimasi pemerintah, kualitas demokrasi, dan mekanisme pengambilan keputusan menjadi faktor penentu keamanan nasional. Konflik internal yang dapat timbul dari dinamika politik, berpotensi melemahkan struktur negara dan mengancam kesatuan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi, partisipasi, dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan menjadi fondasi penting dalam menjaga keamanan politik.

Sektor ekonomi memiliki signifikansi yang tak kalah penting dalam menjamin keamanan manusia. Kemampuan individu dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan menjadi indikator fundamental kesejahteraan. Ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dapat memicu ketegangan sosial yang berpotensi mengancam stabilitas nasional. Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan menjadi prasyarat untuk menciptakan ketahanan sosial-ekonomi.

Dimensi sosial dalam keamanan nasional merujuk pada kompleksitas hubungan antarkelompok dalam masyarakat. Isu-isu sensitif seperti identitas etnis, agama, dan kelas sosial memiliki potensi konflik yang tinggi. Keberagaman yang tidak dikelola dengan baik dapat memunculkan segregasi, diskriminasi, dan ketegangan antarkelompok. Pendekatan integratif yang menghormati perbedaan, mendorong dialog, dan membangun kohesi sosial menjadi kunci menjaga keharmonisan dan mencegah konflik horizontal.

Terakhir, sektor lingkungan kini semakin mendapatkan perhatian dalam paradigma keamanan modern. Perubahan iklim, bencana alam, degradasi ekosistem, dan krisis sumber daya alam memiliki

dampak signifikan terhadap kelangsungan hidup manusia. Ancaman lingkungan dapat memicu migrasi besar-besaran, konflik sumber daya, dan ketidakstabilan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, mitigasi risiko bencana, dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi bagian integral dari strategi keamanan nasional.

Fungsi dan Peran Keamanan Nasional dalam Era Global

Kelima sektor tersebut tidak dapat dipandang secara terpisah, melainkan saling berinterkoneksi dan mempengaruhi. Pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan kompleksitas hubungan antara aspek militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi prasyarat dalam membangun ketahanan nasional yang tangguh dan berkelanjutan (Mardhani et al., 2020).

Keamanan nasional sendiri berfungsi untuk melindungi kedaulatan negara dari berbagai ancaman. Dalam era globalisasi, ancaman terhadap kedaulatan dapat datang dari berbagai sumber, termasuk terorisme, kejahatan lintas negara, dan konflik regional. Oleh karena itu, negara perlu memiliki sistem keamanan yang efektif untuk menjaga integritas wilayah dan kedaulatan. Keamanan nasional yang baik dapat mengurangi potensi konflik sosial dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Ketidakadilan, ketidakpuasan, dan perpecahan dalam masyarakat dapat menjadi pemicu konflik, sehingga penting bagi negara untuk mengatasi isu-isu ini melalui pendekatan keamanan yang holistik. Keamanan nasional yang terjamin akan menciptakan rasa aman bagi investor dan pelaku ekonomi (Snow, 2016). Ketika masyarakat merasa aman, mereka lebih cenderung untuk berinvestasi dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Sebaliknya, ketidakamanan dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Baldwin, 2020).

Di negara yang multikultural seperti Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah tantangan yang besar. Konsep keamanan nasional harus mencakup upaya untuk mengatasi perbedaan yang ada, seperti perbedaan suku, agama, dan budaya. Melalui pendekatan yang inklusif, negara dapat menciptakan rasa memiliki dan kebersamaan di antara seluruh warga negara. Ancaman terhadap keamanan nasional tidak lagi bersifat lokal, tetapi juga global. Isu-isu seperti perubahan iklim, pandemi, dan terorisme internasional memerlukan kerjasama antarnegara. Oleh karena itu, keamanan nasional harus mencakup strategi yang responsif terhadap

dinamika global dan regional, serta melibatkan kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan bersama.

Konsep Keamanan Nasional Ukraina

Ukraina, negara yang terletak di Eropa Timur, memiliki sejarah panjang dan kompleks. Berbatasan dengan Rusia di timur dan Uni Eropa di barat, posisi geografisnya telah membentuk dinamika keamanan nasional yang unik. *Міністерство оборони України* (*Ministerstvo oborony Ukrainy*) atau Kementerian Pertahanan Ukraina memainkan peran krusial dalam membentuk strategi keamanan nasional negara tersebut. Pada awal kemerdekaannya, konsep keamanan nasional Ukraina masih sangat dipengaruhi oleh warisan Soviet. Fokus utama adalah pada pertahanan teritorial dan pengelolaan hubungan dengan Rusia. Pada tahun 1992 sebagai respon terhadap berbagai permasalahan keamanan, Ukraina secara resmi mendirikan *Рада національної безпеки і оборони України* (*Rada natsionalnoyi bezpeky i oboroni Ukrayiny*) atau Dewan Keamanan Nasional dan Pertahanan Ukraina, yang kemudian pada tahun 1993 mengubah doktrin militer dari pro Rusia menjadi negara yang memiliki netralitas dan tidak bergabung dengan aliansi militer mana pun (Jones, 2018).

Akan tetapi, Revolusi Oranye pada 2004 menandai titik balik dalam orientasi keamanan Ukraina. Strategi Keamanan Nasional 2007 mulai menekankan integrasi dengan struktur Euro-Atlantik, termasuk keanggotaan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) sebagai tujuan jangka panjang. Meski demikian, implementasi ini terhambat oleh ketidakstabilan politik dalam negeri. Di bawah kepemimpinan Presiden Viktor Yanukovych, Ukraina kembali mengadopsi kebijakan "non-blok". Undang-Undang tentang Prinsip-Prinsip Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Nasional 2010 secara resmi menghapus tujuan keanggotaan NATO. Fokus keamanan beralih ke netralitas dan keseimbangan antara Rusia dan Barat. Aneksasi Krimea oleh Rusia dan konflik di Donbas pada 2014 memicu perubahan radikal dalam konsep keamanan nasional Ukraina (Novytskyi et al., 2022). Strategi Keamanan Nasional 2015 mengidentifikasi Rusia sebagai ancaman utama dan menegaskan kembali orientasi Euro-Atlantik. Periode ini ditandai dengan:

1. Peningkatan signifikan anggaran pertahanan disertai penegakan hukum yang ketat terhadap aktivitas korupsi di kementerian pertahanan Ukraina (*President of Ukraine*, 2020). Sebagai bukti ketegasan Pemerintah Ukraina terhadap pemberantasan korupsi di Kementerian Pertahanan, secara terbuka

- melalui *The National Anti-Corruption Bureau* (NABU), pemerintah Ukraina membuka penyelidikan terhadap Menteri Pertahanan, Rustem Umerov atas tuduhan korupsi dan Penyalahgunaan kekuasaan.
2. Reformasi sektor keamanan dan pertahanan yang dimulai dengan dibukanya kembali kebijakan Wajib militer bagi warga negara Ukraina pasca aneksasi Krimea. Melalui pemberlakuan *The Law of Mobilization No. 3633-IX*, pemerintah Ukraina secara cepat menurunkan batas minimal usia wajib militer warga negaranya meski dalam proses restrukturisasi keamanan dan pertahanan dalam upaya penggabungan dengan militer NATO. Pada tahap berikutnya diberikan izin pengembangan dan penelitian kepada pihak swasta guna mengembangkan teknologi militer, sehingga dalam hal ini sisi eksklusivitas badan keamanan dan pertahanan tidak lagi begitu kuat (Löflund, 2025);
 3. Penguatan kerjasama militer dengan NATO dan negara-negara Barat dengan menanggalkan struktur militer yang diwariskan oleh Soviet untuk membangun sistem komando yang lebih responsif dan sesuai dengan standar NATO;
 4. Pengembangan kapabilitas untuk menghadapi perang hibrida melalui pembentukan *Unmanned System Forces* (USF) yang berfokus pada peralatan tempur tanpa awak baik di darat, laut, maupun udara. Kemudian adanya pengembangan teknologi pertahanan seperti Sistem Delta yakni sebuah teknologi kesadaran situasional yang mampu mengintegrasikan data dari *drone*, satelit dan intelijen secara *real-time* dalam situasi perang (Oliker et al., 2016)

Selain itu dalam konsep keamanan nasional Ukraina pasca invasi Rusia turut mempengaruhi fokus utama keamanan nasional, diantaranya :

1. Ancaman Militer

Konflik berkelanjutan dengan Rusia menegaskan perlunya *response* militer yang kuat. Ukraina telah memobilisasi angkatan bersenjataanya dan mencari bantuan militer internasional untuk memperkuat kemampuan pertahanannya. Pembentukan aliansi dan kemitraan militer baru sangat penting dalam meningkatkan postur pertahanan Ukraina terhadap agresi dari luar.

2. Perang Informasi

Konflik ini juga menyoroti pentingnya keamanan informasi. Rezim otoriter sering menggunakan perang informasi sebagai pendahuluan aksi militer. Respons Ukraina melibatkan pengembangan strategi untuk melawan disinformasi dan meningkatkan

ketahanan publik terhadap propaganda (Radchenko et al., 2023).

3. Stabilitas Ekonomi

Keamanan ekonomi terkait erat dengan keamanan nasional. Perang telah mengganggu kegiatan ekonomi, sehingga diperlukan langkah-langkah untuk memastikan ketahanan dan keberlanjutan ekonomi. Ini termasuk diversifikasi sumber energi dan mengamankan dukungan ekonomi internasional untuk mengurangi dampak konflik.

4. Kerangka Hukum dan Kelembagaan

Pembentukan kerangka hukum untuk keamanan nasional sangat penting bagi pemerintahan yang efektif. Doktrin konstitusional keamanan nasional Ukraina menguraikan prinsip-prinsip dan model legislatif yang diperlukan untuk pembangunan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia selama masa perang (Shkuta et al., 2024).

Fokus Keamanan Nasional Ukraina Pasca Invasi Rusia

Invasi Rusia terhadap Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 merupakan konflik bersenjata terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II. Agresi militer Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin dilatarbelakangi oleh kompleksitas sejarah, geopolitik, dan ambisi ekspansif untuk mengendalikan wilayah strategis di Eropa Timur. Serangan sistematis dimulai dengan operasi militer skala besar melintasi perbatasan Ukraina dari beberapa arah, termasuk dari Belarus di utara, Krimea di selatan, dan wilayah timur Donbas. Rusia menggunakan kekuatan artileri, tank, dan pasukan infantri untuk melakukan invasi, dengan target utama menguasai kota-kota penting seperti Kyiv, ibu kota Ukraina. Konflik ini mengakibatkan krisis kemanusiaan besar-besaran dengan ribuan korban jiwa, perpindahan penduduk massal, dan kerusakan infrastruktur yang signifikan. Perang berlangsung intens dengan pertempuran sengit di berbagai wilayah, termasuk Mariupol, Kharkiv, dan Donbas. Ukraina di bawah kepemimpinan Presiden Volodymyr Zelenskyy menunjukkan resistensi yang luar biasa, membangkitkan semangat nasionalisme dan mendapatkan simpati internasional. Perlawanan militer Ukraine yang efektif mengejutkan banyak pengamat yang semula memprediksi kekalahan cepat. Dampak geopolitik invasi ini sangat kompleks, memicu ketegangan antara Rusia dan Barat, serta merombak tatanan keamanan nasional Ukraina hingga internasional. Konflik ini tidak hanya sekadar perang antara dua negara, melainkan pertarungan ideologis dan strategis dengan

implikasi global yang mendalam. Upaya-upaya dalam memperkuat kembali keamanan nasional Ukraina, dilakukan dengan beberapa cara konkret yakni :

1. Peningkatan Belanja Militer Ukraina secara signifikan ditujukan bagi anggaran pertahanannya untuk mendukung operasi militer dan meningkatkan kemampuan keamanan. Tidak hanya dari dalam negeri, Ukraina juga mendapatkan bantuan anggaran militer dari negara-negara Eropa seperti Jerman (Primayanti & Novarina, 2024) dan Amerika Serikat (Reuters, 2024). Akan tetapi, hal ini tidak memiliki efek jangka panjang yang menguntungkan karena menimbulkan ketergantungan dan hutang asing di masa yang akan datang.
2. Memperkuat penegakan hukum dalam Kementerian Pertahanan terutama penindakan terhadap perilaku korupsi yang dilakukan oleh para pejabat tinggi militer (Getman & Yakoviyk, 2019). Penindakan ini direalisasikan dalam pemberhentian sejumlah pejabat tinggi di kementerian Kementerian Ukraina pada bulan Januari 2024 oleh menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Umerov .
3. Pertimbangan Hak Asasi Manusia, mengingat perang menimbulkan pertanyaan kritis tentang perlindungan hak asasi manusia dalam konteks keamanan nasional. Memastikan bahwa langkah-langkah keamanan tidak melanggar kebebasan sipil merupakan tantangan besar bagi pemerintah Ukraina (Kobko, 2022).
4. Invasi Rusia pada akhirnya, telah mendorong Ukraina untuk membuka kerja sama internasional yang lebih besar dalam masalah keamanan, dengan menerima bantuan militer dan kemanusiaan dari berbagai negara. Kerja sama ini penting untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Ukraina dan memastikan keamanan kolektif di kawasan (Rynning, 2024).

Konsep Keamanan Nasional Indonesia

Konsep keamanan nasional dan pertahanan Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan dan pengalaman menghadapi berbagai ancaman internal dan eksternal. Doktrin pertahanan Indonesia telah berkembang dari fokus pada perjuangan gerilya melawan penjajah hingga menjadi sistem pertahanan modern yang menghadapi tantangan abad ke-21 (Sebastian & Gindarsah, 2013). Sedangkan, doktrin pertahanan Indonesia didasarkan pada konsep Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang melibatkan seluruh

komponen bangsa dalam upaya pertahanan negara. Doktrin Pertahanan Indonesia menekankan pada pertahanan aktif, strategi pertahanan berlapis, penggunaan kekuatan militer sebagai upaya terakhir dan keterlibatan seluruh rakyat dalam pertahanan (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Keamanan nasional merupakan aspek krusial bagi kedaulatan dan stabilitas setiap negara. Bagi Indonesia, konsep keamanan nasional memiliki beberapa dimensi penting:

1. Pendekatan Komprehensif yakni pendekatan keamanan yang menyeluruh, mencakup aspek militer dan non-militer. Hal ini meliputi langkah-langkah keamanan tradisional seperti pertahanan wilayah, serta langkah-langkah keamanan non-tradisional seperti ketahanan pangan, energi, dan lingkungan.
2. Doktrin Pertahanan Semesta yang merujuk pada konsep pertahanan dengan melibatkan seluruh rakyat, wilayah, dan sumber daya nasional dalam upaya pertahanan. Doktrin ini menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan nasional.
3. Diplomasi dan Kerjasama Internasional, merujuk pada keaktifan Indonesia dalam menjalin kerjasama keamanan dengan negara lain dan organisasi internasional untuk menjaga stabilitas kawasan dan menangani ancaman lintas batas (Anwar, 2020).
4. Keamanan Maritim merupakan dimensi yang berhubungan dengan geografi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga Indonesia memberikan perhatian khusus pada keamanan maritim, termasuk pemberantasan penangkapan ikan ilegal dan pembajakan.
5. Ketahanan Nasional merupakan konsep yang menekankan pentingnya memperkuat ketahanan di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial budaya, dan politik, sebagai landasan keamanan nasional.
6. Penanggulangan Terorisme dan Deradikalisasi dikembangkan sebagai strategi komprehensif untuk mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme, yang melibatkan pendekatan keras dan lunak (Barton et al., 2021).
7. Keamanan Siber didasarkan pada perkembangan dan kemajuan teknologi, yang mengharuskan Indonesia semakin berfokus pada penguatan keamanan siber untuk melindungi infrastruktur kritis dan data nasional (Nugroho, 2020).

b. Pembahasan

Transformasi Keamanan-Pertahanan Ukraina Pasca Invasi Rusia dan Implikasinya bagi Indonesia

Fakta adanya pemberontakan di Donetsk dan Luhansk serta invasi militer Rusia terhadap Ukraina, bukan berarti tak ada pembelajaran yang dapat diperoleh bagi Indonesia dalam menguatkan keamanan dan pertahanan. Dinamika Keamanan Nasional di Ukraina dimulai dari birokrasi, kebijakan dan alat-alat pertahanan negara dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor pemicu

yang dapat mengancam Keamanan Nasional. Namun, Ukraina secara bertahap menguatkan kembali keamanan nasionalnya di tengah invasi Rusia. Sebagai perbandingan antara Ukraina dan Indonesia dalam kebijakan keamanan dan pertahanan menghadapi ancaman, berikut merupakan tabel karakter dan implikasi kedua negara.

Tabel 1. Perbandingan Keamanan-Pertahanan Ukraina dan Indonesia

Aspek Keamanan	Ukraina	Indonesia	Implikasi
Ancaman Utama	Invasi militer Rusia, separatisme regional, perang hibrida	Terorisme, separatisme, konflik sosial, ancaman maritim	Perlu antisipasi ancaman hibrida dan perang informasi
Orientasi Geopolitik	Transisi dari Commonwealth of Independent States (CIS) menuju Aliansi Uni Eropa	Non-blok aktif, bebas dan aktif	Fleksibilitas dalam menghadapi tekanan geopolitik
Struktur Pertahanan	Transisi dari sistem Soviet ke standar NATO	Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata)	Modernisasi dengan mempertahankan karakteristik lokal
Kerjasama Internasional	Intensifikasi dengan NATO dan Uni Eropa	ASEAN, kemitraan bilateral dan multilateral	Penguatan kerjasama regional sebagai basis utama
Reformasi Sektor Keamanan	Reformasi radikal anti korupsi, transparansi anggaran	Reformasi bertahap, profesionalisme TNI	Akselerasi reformasi dengan pembelajaran Ukraina
Ketahanan Informasi	Fokus counter-disinformasi dan propaganda	Literasi digital, UU ITE	Penguatan sistem ketahanan informasi nasional
Mobilisasi Masyarakat	Wajib militer darurat, keterlibatan sipil dalam perang	Bela Negara, komponen cadangan	Optimalisasi peran masyarakat dalam pertahanan
Teknologi Pertahanan	Pengembangan drone dan sistem tanpa awak	Modernisasi alutsista, kemandirian industri pertahanan	Investasi R & D teknologi pertahanan

Sumber : Peneliti

Upaya-upaya inilah yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi Indonesia dalam melihat strategi apa yang dapat diambil ketika negara dalam keadaan terdesak atau bisa pula belajar untuk menghindari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Ukraina dalam membangun keamanan nasional. Berikut ini merupakan beberapa poin pembelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia terhadap Ukraina terkait Keamanan Nasional.

1. Pendekatan Komprehensif

Ukraina mengembangkan konsep keamanan yang mencakup aspek tradisional dan non-tradisional, termasuk pertahanan militer, keamanan informasi, stabilitas ekonomi, serta

kerangka hukum dan kelembagaan. Dalam pendekatan konvensional Ukraina tetap mengedepankan kuantitas pasukan melalui penetapan darurat perang melalui implementasi kebijakan wajib militer bagi rakyatnya yang memenuhi syarat (Kobko, 2022). Pertahanan militer seperti ini jadi pilihan darurat yang dianggap lebih tepat dalam menjawab kebutuhan personil di lapangan terutama ketika negara sedang mengalami kekurangan modal perang tetapi memiliki jumlah penduduk yang banyak (Beckley, 2010).

Indonesia telah menerapkan pendekatan komprehensif melalui konsep Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), namun masih memerlukan penguatan pada

beberapa aspek.

Dalam konteks ancaman hibrida yang semakin kompleks, Indonesia perlu mengintegrasikan lebih optimal antara kekuatan militer, ekonomi, dan *soft power*. Ketahanan nasional Indonesia yang dibangun atas dasar Pancasila memberikan keunggulan ideologis yang kuat, namun implementasinya dalam menghadapi ancaman modern perlu diperkuat.

Sistem pertahanan Indonesia yang berbasis pada partisipasi masyarakat memberikan potensi besar untuk mobilisasi massa seperti yang ditunjukkan Ukraina, namun memerlukan modernisasi dalam aspek teknologi dan koordinasi antar institusi. Indonesia memiliki keunggulan demografis dengan populasi terbesar keempat dunia, namun tantangannya adalah memastikan kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi ancaman kontemporer.

2. Adaptasi Ancaman Terbaru

Ukraina telah mengembangkan kapabilitas untuk menghadapi perang hibrida dan ancaman non-konvensional. Menurut Kühn & Williams (2025) dalam perang informasi terdapat berbagai keuntungan bagi mereka yang menggunakannya, di antaranya meminimalisir dampak destruktif dari perang itu sendiri. Akan tetapi bagi mereka yang menjadi sasarannya, perang informasi dapat menjadi ancaman yang merusak secara internal seperti yang terjadi dalam perang Rusia-Ukraina.

Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam menghadapi ancaman hibrida, terutama perang informasi dan serangan siber. Kondisi geografis kepulauan dan keragaman etnis membuat Indonesia rentan terhadap disinformasi yang dapat memicu konflik horizontal. Pengalaman Indonesia dalam menghadapi *hoaks* dan ujaran kebencian di media sosial menunjukkan perlunya penguatan sistem deteksi dini dan respons cepat.

Kemampuan Indonesia dalam menangkal ancaman siber masih memerlukan peningkatan, terutama dalam melindungi infrastruktur kritis dan data nasional. Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan langkah positif, namun koordinasi antar lembaga dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ahli siber masih perlu diperkuat. Indonesia juga perlu mengembangkan strategi *counter-narrative* yang efektif untuk menghadapi propaganda dan disinformasi.

3. Reformasi Sektor Keamanan dan Pertahanan

Ukraina melakukan reformasi signifikan di sektor ini, termasuk peningkatan anggaran dan penindakan tegas terhadap korupsi (Kravtsov et al., 2024). Dalam perang Ukraina-Rusia, urgensi

reformasi sektor keamanan dan militer tidak hanya dilakukan oleh Ukraina sebagai negara yang diinvasi, tetapi Rusia juga turut belajar bahwa dalam keadaan genting tersebut sebagai pihak invader maka reformasi justru harus dioptimalkan untuk memperkuat pertahanan dari dalam negara.

Reformasi TNI yang dimulai sejak era reformasi telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam profesionalisme dan akuntabilitas. Namun, pembelajaran dari Ukraina menunjukkan perlunya akselerasi reformasi, terutama dalam aspek transparansi anggaran dan penerapan teknologi modern. Indonesia perlu memperkuat mekanisme *oversight* sipil terhadap sektor pertahanan sambil memastikan efektivitas operasional.

Industri pertahanan Indonesia yang dikembangkan melalui PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia perlu diperkuat untuk mengurangi ketergantungan impor alutsista. Pengalaman Ukraina dalam mengembangkan teknologi pertahanan domestik, terutama sistem *drone* dan peralatan tanpa awak, dapat menjadi rujukan untuk pengembangan industri pertahanan nasional.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista harus diperkuat untuk mencegah korupsi yang dapat melemahkan kemampuan pertahanan. Sistem pengawasan terintegrasi dan audit berkelanjutan perlu diterapkan secara konsisten.

4. Kerjasama Internasional

Menurut Cordesman & Hwang (2022), Ukraina memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman ketika bersama Rusia yang dibuktikan dengan menjalin kerjasama dengan Uni Eropa dan NATO tetapi lalai dalam menjaga hubungan baiknya dengan negara tetangga terdekat sehingga dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk semakin mempererat hubungan kerjasama regional dengan negara-negara ASEAN sebagai upaya menciptakan regional *shield*.

Kekuatan Indonesia dalam diplomasi dan kerjasama regional melalui ASEAN memberikan keuntungan strategis yang tidak dimiliki Ukraina sebelum konflik. Posisi Indonesia sebagai negara non-blok memungkinkan fleksibilitas dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak tanpa terjebak dalam polarisasi geopolitik.

Namun, Indonesia perlu memperkuat kerjasama pertahanan bilateral dan multilateral, terutama dalam menghadapi ancaman maritim di perairan strategis seperti Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. Kerjasama dengan Australia melalui *Lombok Treaty*, dengan Singapura dalam bidang keamanan maritim, dan dengan negara-negara ASEAN dalam *framework ASEAN Defence Ministers' Meeting* (ADMM) perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu mengembangkan kerjasama

teknologi pertahanan dengan negara-negara maju seperti Korea Selatan (KF-21), Turki (teknologi drone), dan Eropa (teknologi maritim) untuk mempercepat modernisasi alutsista sambil mempertahankan kemandirian strategis.

5. Penguatan Ketahanan Masyarakat

Ukraina fokus pada peningkatan ketahanan publik terhadap propaganda dan disinformasi. Kemudian ketahanan budaya juga menjadi salah satu bagian terpenting yang perlu dipelajari oleh Indonesia dari kegagalan Ukraina dalam menyatukan rasa nasionalisme antar etnis di wilayah Timur Ukraina (Lukuaka et al., 2024).

Indonesia memiliki keunggulan dalam ketahanan ideologi melalui Pancasila sebagai dasar negara yang mengakomodasi keberagaman. Berbeda dengan Ukraina yang mengalami polarisasi ideologis antara orientasi Barat dan Timur, Indonesia telah memiliki konsensus nasional yang kuat. Namun, tantangan muncul dari infiltrasi ideologi radikal dan separatisme yang memanfaatkan sentimen etnis dan agama. Pengalaman Ukraina menunjukkan pentingnya memperkuat narasi nasional yang inklusif. Indonesia perlu terus memperkuat pendidikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika untuk mencegah disintegrasi seperti yang terjadi di wilayah timur Ukraina.

Sistem demokrasi Indonesia yang sudah mapan memberikan legitimasi politik yang kuat dibandingkan Ukraina yang masih mengalami transisi demokrasi. Namun, polarisasi politik yang menguat dalam beberapa tahun terakhir perlu mendapat perhatian serius. Pengalaman Ukraina menunjukkan bagaimana polarisasi politik dapat dieksploitasi oleh kekuatan asing. Indonesia perlu memperkuat kultur politik yang toleran dan dialog antar elit politik untuk mencegah polarisasi yang berlebihan. Sistem *checks and balances* dalam demokrasi Indonesia harus dijaga untuk mencegah otoritarianisme yang dapat melemahkan ketahanan politik.

Ketergantungan ekonomi Ukraina pada Rusia menjadi kelemahan strategis yang dapat dieksploitasi. Indonesia memiliki keunggulan dengan ekonomi yang lebih terdiversifikasi, namun ketergantungan pada komoditas dan impor teknologi masih menjadi kerentanan. Indonesia perlu memperkuat kemandirian ekonomi melalui pengembangan industri strategis, diversifikasi mitra dagang, dan penguatan ekonomi digital. Pengalaman Ukraina menunjukkan pentingnya memiliki cadangan devisa yang cukup dan sistem keuangan yang resilient untuk menghadapi krisis.

Keberagaman etnis dan budaya Indonesia yang jauh lebih kompleks dari Ukraina memerlukan pengelolaan yang hati-hati. Kegagalan Ukraina

dalam mengintegrasikan minoritas etnis Rusia di wilayah timur memberikan pelajaran penting bagi Indonesia.

Indonesia perlu memperkuat program integrasi sosial yang menghormati keberagaman sambil membangun identitas nasional yang kuat. Program pembauran sosial, pertukaran budaya antar daerah, dan pendidikan multikultural harus diperkuat untuk mencegah segregasi yang dapat dieksploitasi oleh kekuatan disruptif.

Sistem Sishankamrata Indonesia memberikan fondasi yang kuat untuk mobilisasi masyarakat dalam pertahanan. Pengalaman Ukraina dalam melibatkan masyarakat sipil dalam pertahanan memberikan validasi terhadap konsep ini. Indonesia perlu memperkuat program Bela Negara dan komponen cadangan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi ancaman. Pelatihan dasar militer untuk masyarakat, sistem peringatan dini, dan koordinasi antara militer-sipil harus diperkuat.

6. Keseimbangan antara Keamanan dan HAM

Ukraina berupaya memastikan langkah-langkah keamanan tidak melanggar kebebasan sipil. Menurut Setiawan (2021), isu keamanan dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pasca G30S sering menjadi sorotan tersendiri bahkan keamanan Indonesia hampir saja jatuh pasca diembargo Amerika Serikat terkait masalah isu pelanggaran HAM di Timor-Timur. Indonesia telah mengalami pembelajaran pahit terkait pelanggaran HAM dalam operasi keamanan. Pengalaman Ukraina dalam menjaga keseimbangan antara keamanan dan HAM di tengah konflik memberikan perspektif baru tentang pentingnya legitimasi internasional.

Indonesia perlu memperkuat mekanisme *oversight* dan akuntabilitas dalam operasi keamanan. Komnas HAM, pengadilan HAM, dan mekanisme *complaint handling* harus diperkuat untuk memastikan operasi keamanan tetap menghormati HAM. Pelatihan HAM untuk aparat keamanan dan sistem monitoring yang transparan perlu diterapkan secara konsisten.

Dalam menghadapi ancaman terorisme dan separatisme, Indonesia harus memastikan bahwa pendekatan keamanan tidak diskriminatif dan menghormati prinsip *due process*. Pengalaman Ukraina menunjukkan bahwa legitimasi internasional sangat penting dalam mendapatkan dukungan global.

7. Fleksibel terhadap Dinamika Geopolitik

Konsep keamanan Ukraina berevolusi sesuai dengan perubahan situasi geopolitik. Indonesia dapat meningkatkan fleksibilitas doktrin keamanannya untuk menghadapi dinamika geopolitik yang berubah cepat.

Politik luar negeri bebas aktif Indonesia

memberikan fleksibilitas strategis yang tidak dimiliki Ukraina sebelum konflik. Namun, intensifikasi kompetisi Amerika Serikat-Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik menghadirkan tantangan baru yang memerlukan adaptasi kebijakan.

Indonesia perlu mengembangkan strategi *hedging* yang lebih *sophisticated* untuk mengelola hubungan dengan kekuatan besar sambil mempertahankan otonomi strategis. Diversifikasi kemitraan strategis, penguatan posisi di organisasi internasional, dan pengembangan kapabilitas *middle power diplomacy* menjadi kunci dalam menjaga fleksibilitas geopolitik.

Doktrin pertahanan Indonesia perlu diperbarui untuk mengakomodasi ancaman-ancaman baru sambil mempertahankan prinsip-prinsip dasar. Fleksibilitas dalam taktik dan strategi harus diimbangi dengan konsistensi dalam prinsip dan nilai-nilai fundamental bangsa.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa temuan signifikan terkait transformasi keamanan-pertahanan Ukraina pasca invasi Rusia dan implikasinya bagi Indonesia. Transformasi keamanan nasional Ukraina menunjukkan evolusi dramatis dari orientasi netral menuju integrasi penuh dengan struktur keamanan Euro-Atlantik. Perubahan radikal ini dipicu oleh aneksasi Krimea 2014 dan intensifikasi konflik dengan Rusia sejak 2022, mendorong Ukraina untuk mengimplementasikan reformasi sektor keamanan yang komprehensif melalui peningkatan anggaran pertahanan, pemberantasan korupsi sistemik, dan modernisasi struktur militer dari warisan Soviet menuju standar NATO.

Pendekatan keamanan Ukraina telah mengalami evolusi fundamental dari paradigma konvensional menuju konsep keamanan hibrida yang mengintegrasikan aspek militer, informasi, ekonomi, dan diplomasi. Pengembangan kapabilitas perang informasi, teknologi pertahanan tanpa awak seperti *drone*, dan sistem kesadaran situasional seperti Sistem Delta menunjukkan adaptasi yang *remarkable* terhadap ancaman kontemporer yang semakin kompleks. Mobilisasi masyarakat sipil Ukraina dalam upaya pertahanan nasional juga memvalidasi konsep pertahanan semesta, dimana seluruh komponen bangsa terlibat aktif dalam menghadapi ancaman eksistensial. Implementasi kebijakan wajib militer darurat dan keterlibatan masyarakat sipil dalam perang informasi mendemonstrasikan efektivitas pendekatan *people-centered security* yang dapat menjadi *force multiplier* signifikan.

Analisis komparatif mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia dan Ukraina memiliki konteks

geopolitik yang berbeda, terdapat relevansi strategis dalam aspek-aspek transformasi keamanan yang dapat diadaptasi, khususnya dalam menghadapi ancaman hibrida dan non-konvensional. Berdasarkan temuan ini, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman Ukraina melalui beberapa dimensi strategis yang kritis. Adaptasi sektor keamanan melalui pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek tradisional dan non-tradisional keamanan menjadi sangat relevan. Konsep Sishankamrata Indonesia memerlukan penguatan dalam aspek teknologi modern dan koordinasi antar institusi untuk mengoptimalkan potensi demografis dalam menghadapi ancaman kontemporer.

Adaptasi terhadap ancaman hibrida, terutama perang informasi dan serangan siber, menjadi pembelajaran krusial mengingat kondisi geografis kepulauan dan keragaman etnis Indonesia yang memerlukan penguatan sistem deteksi dini, respons cepat, dan pengembangan strategi *counter-narrative* yang efektif. Reformasi sektor keamanan dan pertahanan melalui akselerasi transparansi anggaran, penerapan teknologi modern, dan penguatan industri pertahanan domestik juga penting untuk mengurangi ketergantungan impor alutsista. Optimalisasi kerjasama internasional dengan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang fleksibel dalam menjalin kemitraan strategis sambil mempertahankan otonomi dan kemandirian strategis menjadi aspek yang tidak kalah penting.

Penguatan ketahanan masyarakat melalui konsolidasi ideologi Pancasila, pencegahan polarisasi politik, diversifikasi ekonomi, dan penguatan program integrasi sosial yang menghormati keberagaman merupakan dimensi yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia. Keseimbangan antara keamanan dan HAM dengan memperkuat mekanisme *oversight*, akuntabilitas dalam operasi keamanan, dan legitimasi internasional dalam menghadapi ancaman juga menjadi pembelajaran berharga. Terakhir, fleksibilitas terhadap dinamika geopolitik melalui pengembangan strategi *hedging* yang *sophisticated* untuk mengelola kompetisi kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik sambil mempertahankan politik luar negeri bebas aktif menjadi kunci dalam menjaga kemandirian strategis Indonesia.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis signifikan terhadap pengembangan ilmu keamanan nasional dalam beberapa aspek fundamental. Validasi konsep sekuritisasi Barry Buzan dalam konteks konflik kontemporer menunjukkan bagaimana *speech act* dan proses sekuritisasi dapat mengubah prioritas nasional secara radikal dalam menghadapi ancaman eksistensial. Hal ini memperkaya pemahaman

teoritis tentang dinamika transformasi keamanan dalam situasi krisis dan memberikan *framework* analitis yang lebih komprehensif. Pengembangan paradigma keamanan hibrida yang mengintegrasikan ancaman konvensional dan non-konvensional juga menjadi kontribusi penting, dimana pengalaman Ukraina menunjukkan bahwa teori keamanan tradisional yang berfokus pada ancaman militer perlu diperluas untuk mencakup dimensi informasi, siber, dan ekonomi dalam satu *framework* yang koheren.

Kontribusi terhadap teori pertahanan semesta dengan memvalidasi efektivitas mobilisasi masyarakat sipil dalam pertahanan nasional memberikan evidensi empiris bahwa konsep *people-centered security* dapat menjadi *force multiplier* yang signifikan dalam menghadapi agresi eksternal. Pengembangan teori adaptasi keamanan nasional yang menunjukkan bahwa fleksibilitas dan kemampuan transformasi merupakan elemen krusial dalam survival negara juga berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana negara dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis yang dinamis. Implikasi metodologis dalam studi keamanan komparatif menunjukkan pentingnya mempertimbangkan konteks geopolitik, sosial-budaya, dan historis dalam menganalisis transformasi keamanan nasional, yang memperkaya *toolkit* analitis untuk studi keamanan nasional komparatif.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya memberikan *insights* praktis bagi pengembangan kebijakan keamanan Indonesia, tetapi juga berkontribusi pada *advancement* teoritis dalam disiplin ilmu keamanan nasional, khususnya dalam memahami dinamika transformasi keamanan di era ancaman hibrida dan multipolar. Penting untuk dicatat bahwa setiap negara memiliki konteks geopolitik dan sosial-budaya yang unik, sehingga adopsi kebijakan harus dilakukan dengan pertimbangan cermat terhadap kondisi lokal. Dalam pengembangan konsep keamanan dan pertahanan, Indonesia dapat mempelajari pengembangan dan dinamika masa perang dari Ukraina, namun harus menyadari bahwa salah satu karakter pertahanan Indonesia adalah pertahanan maritim sehingga perlu modifikasi khususnya dalam teknologi alutsista agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, D. F. (2020, Januari). *Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific*. *International Affairs*, 96(1), 111-129. [10.1093/ia/iiz223](https://doi.org/10.1093/ia/iiz223)
- Baldwin, D. A. (2020). *Economic Statecraft: New*

- Edition*. Princeton University Press.
- Barton, G., Vergani, M., & Wahid, Y. (Eds.). (2021). *Countering Violent and Hateful Extremism in Indonesia: Islam, Gender and Civil Society*. Springer Nature Singapore.
- Beckley, M. (2010). *Economic Development and Military Effectiveness*. *Journal of Strategic Studies*, 33(1), 43-79. <https://doi.org/10.1080/01402391003603581>
- Chong, A. (2015). *Smart Power and Military Force: An Introduction*. *Journal of Strategic Studies*, 38(3), 233-244. <https://doi.org/10.1080/01402390.2014.1002915>
- Cordesman, A. H., & Hwang, G. (2022). *Focusing on the Right Strategic Priorities for NATO*. In *NATO and the Ukraine: Reshaping NATO to Meet the Russian and Chinese Challenge* (pp. 3-7). Center for Strategic and International Studies (CSIS). <http://www.jstor.org/stable/resrep39637.2>
- Getman, A., & Yakoviyk, I. (2019). *National security strategy of Ukraine: History of Belated Reforms*. *Problems of Legality*, 8(1), 8-22. [10.21564/2414-990x.147.186338](https://doi.org/10.21564/2414-990x.147.186338)
- Jones, S. A. (2018). *Whither Ukraine? Weapons, State Building and International Cooperation*. Taylor & Francis.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*.
- Kobko, Y. V. (2022, Juni). Legal regulation of national Security in Ukraine: Today's challenges. *Law and Safety*, 85(2), 179-188. <https://doi.org/10.32631/pb.2022.2.17>
- Kravtsov, S., Orobets, K., Shyshpanova, N., Vovchenko, O., & Berezovska-Chmil, O. (2024). *Progress and Challenges in Combating Corruption in Ukraine: Pathways Forward*. *Journal of Strategic Security*, 17(2), 28-43. <https://www.jstor.org/stable/48794002>
- Kühn, U., & Williams, H. (2025). *Governing the impact of emerging technologies: Actors, technologies, and regulation*. *Journal of Strategic Studies*, 1-12. <https://doi.org/10.1080/01402390.2025.2472213>
- Kuzio, T. (2016, Agustus 24). *Ukraine between a Constrained EU and Assertive Russia*. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 55(1), 103 - 120. <https://doi.org/10.1111/jcms.12447>
- Löflund, E. L. (2025). *Ukraine's Law on Mobilisation Positive Effects and Remaining Dilemmas*. *Russia and Eurasia Studies Programm* :Januari 2025 (FOI Memo 8786). <https://foi.se/restapi/report/FOI%20Memo%208786>
- Lukuaka, D. S., Alexandra, H. F. S., Saragih, H. J.

- R., & Widodo, P. (2024). *The Implications of the Nationalist Movement on Inter-ethnic Political Tensions in Eastern Ukraine. International Journal Of Humanities Education and Social Sciences*, 4(3). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i3.1216>
- Mardhani, D., Runturambi, A. J. S., & Hanita, M. (2020). Keamanan dan Pertahanan dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional. *Jurnal Bela Negara*, 10(3), 279-297. <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/862/JPBHV10N3A3>
- Novytskyi, H. V., Shcherbyna, L. I., Pyvovarov, V. V., Kartamysheva, O. Y., & Lysodyed, O. V. (2022, Maret). *Ukraine's Constitutional Doctrine of National Security. Revista Científica General José María Córdova*, 20(38), 387-406. <https://doi.org/10.21830/19006586.902>
- Nugroho, R. (2020). *National Cyber Security: Tantangan Indonesia Terkini*. Rumah Reformasi Kebijakan [Institute for Policy Reform].
- Oliker, O. Davis, L.E., Crane, K., Radin, A., Gventer, C.W, Sondergaard, S., Quinlivan, J.T., Seabrook, S.B., Bellasio, J., Frederick, B., Bega, A., Hlavka, J. (2016). Security Sector Reform in Ukraine. RAND Corporation.
- Perwita, A. A. B. (2013). *Penataan kebijakan keamanan nasional* (Muradi, Ed.). Pusat Studi Politik & Keamanan Universitas Padjadjaran.
- President of Ukraine. (2020). *Decree on the Strategy of National Security of Ukraine*. [Official Document]
- Radchenko, O., Kovach, V., Semenets-Orlova, I., & Zaporozhets, A. (Eds.). (2023). *National Security Drivers of Ukraine: Information Technology, Strategic Communication, and Legitimacy*. Springer Nature Switzerland.
- Reuters. (2024, August 24). Biden Umumkan Bantuan Militer Baru untuk Ukraina. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/biden-umumkan-bantuan-militer-baru-untuk-ukraina/7755246.html>
- Rynning, S. (2024). *NATO: From Cold War to Ukraine, a History of the World's Most Powerful Alliance*. Yale University Press.
- Sebastian, L. C., & Gindarsah, I. (2013). *Assessing military reform in Indonesia. Defense & Security Analysis*, 29(4), 293-307.
- Setiawan, K. M. P. (2021). *Struggling for justice in post-authoritarian states: human rights protest in Indonesia. The International Journal of Human Rights*, 26(3), 541-565. <https://doi.org/10.1080/13642987.2021.1947805>
- Shkuta, O., Leheza, Y., Telelym, I., Anosienkov, A., & Yaroshak, O. (2024, April 30). *National Security in the Conditions of the Russia-Ukraine War: Legal Regulation and Islamic Law Perspectives. Al-Ahkam*, 34(1), 99-120. [10.21580/ahkam.2024.34.1.20413](https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.20413)
- Snow, D. M. (2016). *National Security*. Taylor & Francis.
- Sukmadi, B. H. (2010). *Keamanan nasional: sebuah konsep dan sistem keamanan bagi bangsa Indonesia*. Sekretariat Jenderal, Dewan Ketahanan Nasional.
- Sussex, M., Clarke, M., & Medcalf, R. (2017). *National security: between theory and practice. Australian Journal of International Affairs*, 71(5), 474-478. <https://doi.org/10.1080/10357718.2017.1347139>
- Wolczuk, K. (2016, April). *Managing the flows of gas and rules: Ukraine between the EU and Russia. Eurasian Geography and Economics*, 57(1), 113-137. <https://doi.org/10.1080/15387216.2016.11740>